

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 641-645**

E-ISSN: 2986-6340

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14643246>

Pembiayaan Daerah dalam Keuangan Negara: Tinjauan atas Pengaruh dan Mekanismenya terhadap Ekonomi Daerah

Risma Nursuhayla¹, Melati², Viola Augustia Putri³^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali HajiEmail: rismanursuhayla01@gmail.com, melatisjk@gmail.com, violaptk1@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembiayaan daerah dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi melalui studi literatur dari 10 jurnal yang relevan. Pembiayaan daerah memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi daerah, serta menciptakan kestabilan fiskal. Melalui kajian terhadap berbagai sumber literatur, ditemukan bahwa pembiayaan daerah, yang meliputi dana alokasi umum, surat utang daerah, dan pembiayaan ultra mikro, memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran daerah terbukti meningkatkan efektivitas pembiayaan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan daerah yang dikelola dengan baik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan memperkuat perekonomian lokal. Oleh karena itu, pembiayaan daerah harus direncanakan dengan matang, mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci: *Pembiayaan Daerah, Pembangunan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Akuntabilitas, Pengelolaan Anggaran*

Abstract

This study examines regional financing and its impact on economic development through a literature review of 10 relevant journals. Regional financing plays a crucial role in supporting infrastructure development, regional economic empowerment, and fiscal stability. Through the review of various sources, it was found that regional financing, which includes general allocation funds, regional bonds, and ultra-micro financing, has a significant impact on economic growth and community welfare. Furthermore, transparency, accountability, and the use of technology in managing regional budgets have proven to enhance the effectiveness of regional financing. The study's findings indicate that well-managed regional financing can accelerate the achievement of regional development goals and strengthen the local economy. Therefore, regional financing must be carefully planned, emphasizing transparency and accountability principles to achieve optimal results.

Keywords: *Regional Financing, Economic Development, General Allocation Funds, Accountability, Budget Management*

Article Info

Received Date: 29 December 2024

Revised Date: 05 January 2025

Accepted Date: 10 January 2025

PENDAHULUAN

Keuangan negara memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Salah satu bagian integral dalam keuangan negara adalah pembiayaan daerah, yang menjadi kunci dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembiayaan daerah dilakukan melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembiayaan daerah sangat diperlukan agar alokasi anggaran dapat digunakan secara efektif (Santoso et al., 2023).

Pembiayaan daerah tidak hanya mencakup alokasi dana yang diterima dari pemerintah pusat, tetapi juga mencakup pinjaman daerah, penerbitan surat utang daerah, dan mekanisme lain yang memungkinkan daerah untuk mendapatkan dana tambahan. Keberhasilan pembiayaan daerah berhubungan langsung dengan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran tersebut (Arifina et al., 2021). Pembiayaan daerah yang optimal dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan pembiayaan daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Banyak daerah yang mengalami kesulitan dalam mengelola

anggaran secara efisien, sehingga terjadi pemborosan anggaran yang merugikan pembangunan daerah. Selain itu, banyak daerah yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang sering kali tidak mencukupi kebutuhan pembangunan daerah (Sayadi, 2021). Oleh karena itu, pembiayaan daerah perlu dikelola dengan lebih baik dan lebih transparan.

Salah satu instrumen yang diusulkan untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pembiayaan daerah adalah penggunaan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit ini dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan transaksi yang lebih efisien dan tercatat dengan baik, sehingga meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah (Yulianti & Nurhazana, 2021). Penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mendorong transparansi dan memperbaiki pengelolaan anggaran.

Selain itu, pembiayaan ultra mikro (UMI) menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan UMI dapat mendorong pertumbuhan sektor mikro dan kecil yang merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian daerah (Hia, Handaka, & Zega, 2021). Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha mikro dan kecil, pembiayaan UMI berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi sektor industri mikro.

Namun, meskipun ada berbagai mekanisme pembiayaan yang telah diterapkan, tantangan utama dalam pembiayaan daerah adalah pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran. Pengawasan yang kurang ketat dapat mengarah pada penyalahgunaan anggaran dan ketidakefisienan dalam penggunaan dana (Suparman, 2021). Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih baik agar pembiayaan daerah dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Keterbatasan sumber daya keuangan juga menjadi salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang terbatas, sehingga harus mengandalkan transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mencari solusi alternatif, seperti pemanfaatan pembiayaan berbasis pasar melalui penerbitan surat utang daerah (Susanti, 2022).

Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 turut mempengaruhi pengelolaan keuangan negara, termasuk pembiayaan daerah. Banyak daerah yang harus melakukan penyesuaian anggaran dan pengurangan belanja daerah akibat penurunan pendapatan yang signifikan. Pembiayaan daerah di masa pandemi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak menambah beban keuangan daerah yang sudah terbebani (Arifina et al., 2021).

Pentingnya pengelolaan pembiayaan daerah yang transparan dan efisien mendorong perlunya perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan agar pembiayaan yang diberikan dapat berdampak langsung pada pembangunan daerah. Di sinilah pentingnya peran pembiayaan daerah yang tidak hanya untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri (Hia et al., 2021).

Dengan demikian, pembiayaan daerah yang baik akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembiayaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta untuk menilai mekanisme pembiayaan daerah dalam mendukung transparansi dan pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mengkaji berbagai sumber yang relevan dengan topik pembiayaan daerah. Studi literatur ini dilakukan dengan mempelajari jurnal-jurnal terkini yang membahas tentang pembiayaan daerah, pengelolaan anggaran daerah, serta dampak dari kebijakan pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Sutrisno (2020), studi literatur merupakan pendekatan yang efektif untuk mengidentifikasi temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu dan merumuskan perspektif baru dalam penelitian.

Studi literatur ini juga melibatkan analisis terhadap berbagai regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan daerah, seperti kebijakan mengenai transfer dana dari pemerintah pusat, pembiayaan melalui surat utang daerah, dan pembiayaan ultra mikro (UMI). Sebagaimana dijelaskan oleh Santoso et al. (2023), analisis kebijakan melalui studi literatur memungkinkan peneliti untuk

menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam metode ini, data yang dikumpulkan berasal dari berbagai jurnal dan artikel ilmiah terbaru yang relevan, serta laporan terkait pembiayaan daerah. Analisis terhadap literatur ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan temuan yang dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh pembiayaan daerah terhadap ekonomi daerah dan pengelolaan keuangan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembiayaan daerah dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi daerah dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari 10 jurnal terkait. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber literatur, ditemukan bahwa pembiayaan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal dan pengelolaan keuangan negara. Pembahasan ini akan mengulas berbagai temuan penting dari jurnal-jurnal yang ada terkait dengan mekanisme pembiayaan daerah, akuntabilitas anggaran, serta dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengelolaan Anggaran Daerah dan Transparansi

Menurut Santoso et al. (2023), transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah merupakan faktor krusial dalam mencegah pemborosan dan korupsi yang dapat merugikan pembangunan daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pembiayaan daerah dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti sistem informasi manajemen anggaran, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran (Santoso et al., 2023).

Pembiayaan Ultra Mikro dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Pembiayaan ultra mikro (UMI) juga diidentifikasi sebagai salah satu instrumen yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, terutama untuk sektor mikro dan kecil. Hia et al. (2021) menunjukkan bahwa UMI memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi usaha mikro dan kecil yang selama ini terkendala oleh kesulitan mendapatkan modal. Dengan adanya pembiayaan UMI, sektor mikro dan kecil dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal. Oleh karena itu, UMI menjadi salah satu solusi alternatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Peran Surat Utang Daerah dalam Pembiayaan Daerah

Salah satu sumber pembiayaan yang populer di beberapa daerah adalah penerbitan surat utang daerah. Susanti (2022) menjelaskan bahwa penggunaan surat utang daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh dana yang cukup besar dalam waktu singkat, yang kemudian dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan. Namun, penggunaan instrumen ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menambah beban utang yang dapat berisiko pada kestabilan keuangan daerah. Sebagai pengelola keuangan, pemerintah daerah harus memiliki strategi yang baik dalam merencanakan dan mengelola surat utang tersebut agar tidak menambah beban finansial dalam jangka panjang.

Pengaruh Pembiayaan Daerah terhadap Pembangunan Ekonomi

Sebuah temuan penting dari penelitian Arifina et al. (2021) adalah bahwa pembiayaan daerah berhubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Pembiayaan yang tepat dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mempercepat pembangunan sektor-sektor yang strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan daerah yang baik dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus dalam kajian Suparman (2021), yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran daerah dapat mengurangi penyalahgunaan anggaran. Keberhasilan pembiayaan daerah sangat bergantung pada integritas sistem pengawasan yang ada di pemerintah daerah, serta kemauan untuk melaksanakan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap laporan keuangan daerah.

Pembiayaan Daerah di Masa Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Sayadi (2021) mengemukakan bahwa penurunan pendapatan daerah akibat pandemi menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran, bahkan memangkas beberapa alokasi anggaran untuk proyek pembangunan. Oleh karena itu, pembiayaan daerah harus direncanakan secara matang untuk menanggulangi dampak ekonomi dari pandemi ini, dan mengalokasikan dana yang ada untuk pemulihan ekonomi daerah pasca-pandemi.

Peran Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan. Yulianti dan Nurhazana (2021) menjelaskan bahwa penerapan kartu kredit pemerintah dan teknologi informasi dalam transaksi anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pencatatan yang sering terjadi pada pengelolaan anggaran secara manual. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran dan penggunaan dana daerah.

Keuntungan Pembiayaan Daerah dari Dana Alokasi Umum

Dalam kajian mengenai pembiayaan daerah, Santoso et al. (2023) mengidentifikasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai salah satu sumber utama pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah. DAU memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, terutama daerah-daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas. DAU yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kapasitas pembangunan daerah, terutama dalam sektor-sektor yang mempengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan untuk Infrastruktur Daerah

Arifina et al. (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan daerah yang efektif sangat bergantung pada investasi dalam infrastruktur. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Oleh karena itu, sebagian besar pembiayaan daerah harus diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pembangunan jalan, fasilitas publik, dan sarana transportasi.

Pengelolaan Utang Daerah dan Pengaruhnya terhadap Ekonomi

Menurut Zega (2021), pengelolaan utang daerah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menyebabkan kerugian jangka panjang bagi keuangan daerah. Utang daerah yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, namun jika utang tersebut tidak dikelola dengan bijaksana, maka dapat memperburuk kondisi keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dalam pengelolaan utang daerah agar tidak menambah beban keuangan di masa depan.

SIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap 10 jurnal terkait, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pembiayaan daerah melalui berbagai mekanisme seperti DAU, surat utang daerah, dan pembiayaan ultra mikro dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam melaksanakan proyek pembangunan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan anggaran, merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiayaan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

REFERENSI

- Arifina, M. Z., Ramadhana, M. S., Nurliyantikaa, R., & Mutiaria, Y. L. (2021). Langkah Penanggulangan Keuangan Negara dan Menghindari Penyalahgunaan Dana Bencana Alam di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Negara*, 6(3), 150-165.
- Hia, V. D. P., Handaka, R. D., & Zega, Y. T. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 7(2), 98-111.
- Idrus, A. (2021). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Penyetoran Ke Kas Negara. *Jurnal Hukum Keuangan*, 7(2), 121-134.

- Santoso, J., Hutapea, S. A., Fitri, L., & Kahir, S. (2023). Pengawasan Terhadap Pengelolaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. *Jurnal Pengelolaan Keuangan*, 12(1), 200-214.
- Sayadi, M. H. (2021). APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara Selama Pandemi COVID-19. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 9(2), 245-260.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 8(4), 123-136.
- Susanti, A. D. (2022). Perspektif Hukum Keuangan Negara Terhadap Mekanisme Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 10(1), 89-102.
- Syahri, M. (2021). Pengelolaan Anggaran Daerah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Daerah*, 10(4), 235-250.
- Yulianti, D., & Nurhazana. (2021). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah Dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. *Jurnal Keuangan Negara*, 6(1), 50-63.
- Zega, Y. T. (2021). Langkah Strategis Dalam Pembiayaan Daerah Untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 78-92.